DINAMIKA HARTA WARISAN KELUARGA DALAM KONTEKS PERCERAIAN ISLAM MENURUT HUKUM INDONESIA DAN FIKIH

Muhammad Bintang Persadha¹, Sebrina Syifa Artania², Novi Ratnawati³, Talitha Amaraissa⁴, Riska Rahmadiyah⁵, Laeli Fadhilah⁶, Muhammad Rifqi Aditya⁷, Nur Rofiq⁸
bintangpersadha@gmail.com¹, sebrinasyifaartania@gmail.com², ratnanovi1706@gmail.com³,
talithaamrs@gmail.com⁴, rrhmariska532@gmail.com⁵, laelifadhilah04@gmail.com⁶,
rifqiaditya415@gmail.com⁷, nurrofiq@untidar.ac.id⁸

Universitas Tidar

ABSTRAK

Dalam beberapa waktu terakhir, sudah bukan hal lumrah terdengar berita perceraian. Pada 2023, berdasarkan sumber dan data, penyebab utama dari perceraian di negeri kita adalah perselisihan dan pertengkaran, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian. Tentu saja, data ini sering menjadi patokan masyarakat takut untuk menikah. Disusul dengan kasus angka pernikahan di Indonesia yang dalam satu dekade ini mencapai angka terendah pada tahun 2023. Yaitu Menurun sebanyak 7,51% dibanding 2022. Padahal pada hakikat nya pernikahan adalah cinta yang suci yang dikaruniakan oleh Subhanahu Wa Ta'alla. Tetapi, manusia sering melupakan anugerah cinta yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'alla hanya karena emosi sesaat. Ketika manusia sudah dilahap oleh api emosi, tidak tertutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan terjadi. Pasangan yang sudah tidak bisa diperbaiki dengan nilai nilai aqidah islam, maka harus dibawa kepada hakim yang adil untuk menuntaskan kasus ketidakselarasan pasangan tersebut. Hukum membagi harta "gono-gini" adalah wajib. Hakim yang adil diberikan amanah untuk menuntaskan permasalahan pembagian harta gono-gini dari pasangan yang bercerai.

Kata Kunci : pernikahan, perceraian, warisan, isu keluarga

ABSTRACT

Recently, news of divorce has become commonplace. in 2023, disputes and quarrels will be the main cause of divorce in Indonesia, namely 251,828 cases or 61.67% of the total divorce cases in the country. Of course, this data often becomes a benchmark for people who are afraid of getting married. followed by the case of the marriage rate in Indonesia, which this decade will reach its lowest figure in 2023, namely down 7.51% compared to 2022. However, marriage is essentially pure love that comes from Allah subhanahu wa ta'alla. But people often forget the gift of love given by Allah Subhanahu wa Ta'alla just because of momentary emotions. When humans are consumed by the fire of emotion, it is possible that domestic violence will occur. couples who cannot be repaired according to the values of Islamic aqidah must be brought to a fair judge to resolve cases of incompatibility between the couple. If there is a divorce, joint assets must be divided between the husband and wife as regulated in A fair judge is entrusted with resolving the issue of dividing a couple's assets".

Keywords: marriage, divorce, inheritance, family issues.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, konsep pernikahan tidak hanya merujuk pada hubungan formal dan biologis antara suami dan istri, tetapi juga ikatan lahir batin yang diatur oleh Allah SWT, serta Membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah. Hal ini juga tercermin dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Namun, di zaman sekarang, banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Pernikahan kehilangan nilai sakral di beberapa kalangan, sehingga perceraian dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Media sering mengulas perceraian tokoh-tokoh publik, dan itu menarik perhatian masyarakat. Selain itu, terjadi perselisihan terkait pembagian harta, yang disebut harta gono gini. Kasus perceraian seringkali menjadi rumit dan memanas di

pengadilan.

Sebelumnya, terdapat beberapa peneliti yang membahas mengenai harta gono gini dalam perceraian, antara lain: Pada tahun 2021, Dwi Anindya Harimurti mempelajari Dasar Hukum Harta Bersama dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam kajiannya, dia menemukan bahwa Pasal 35 s/d 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian lain di antara pasangan. Jika terjadi perceraian, pembagian gono- gini dapat diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, Muhammad Andri pada tahun 2022, mengkaji perspektif hukum Islam terhadap gono gini dengan pendekatan yuridis normatif. Dia menyimpulkan bahwa meskipun ada pandangan sejalan antara M. Yahya Harahap dan Muhammad Syah tentang pencaharian bersama suami istri, hal ini tidak dibahas secara khusus dalam literatur hukum Islam karena penulis-penulisnya umumnya orang Arab yang tidak familiar dengan konsep tersebut.

Namun, konsep kongsi atau syirkah dibahas dalam bab mu'amalah kitab fiqh, yang menunjukkan bahwa pencaharian bersama suami istri dapat dianggap sebagai bentuk syirkah dan oleh karena itu, perlu dibahas dalam konteks tersebut untuk menentukan hukumnya. Terakhir, pada tahun 2021, Mutmainna, Kairuddin Karim, Muhammad Akbar Fhad Syahril meneliti tentang harta kekayaan dalam rumah tangga, menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Dia mengutip Pasal 1 bag (f) dalam Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan harta kekayaan dalam perkawinan atau Sirkah sebagai harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama oleh suami istri selama pernikahan, yang kemudian dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempermasalahkan kepemilikan atas kepemilikan siapapun, tanpa nama siapapun.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan atau membedah permasalahan Dinamika Harta Gono Gini Keluarga dalam Konteks Perceraian Islam Menurut Hukum Indonesia dan Fikih. Mengapa ini penting? Mengingat informasi dengan bagaimana harta gono gini akibat perceraian di dalam hukum fikih harus memenuhi syarat syarat tertentu dan juga diatur berdasarkan konsep keadilan. Dalam sisi itulah artikel kemudian diluaskan untuk menambah wawasan mengenai hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pada pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi, Dan sebagainya. Karena penelitian Memiliki Tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara Sistematis, Metodologis, dan Konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang membahas pada permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat saat ini, khususnya terkait perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kemungkinan akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif. Objek yang menjadi fokus kajian adalah inti permasalahan atau fenomena yang diteliti, yaitu Dinamika Harta Warisan Keluarga dalam Konteks Perceraian Islam Menurut Hukum Indonesia dan Fikih.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur online berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan pengumpulan sumber data yang dilakukan melalui penelitian dokumen, khususnya menggunakan dokumen online berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan rincian tentang subjek penelitian artikel ini. Metode deskriptif analitis ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti

Al-Qur'an, Hadist, hukum positif, serta pendapat para ulama dan tokoh hukum. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teks-teks tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah akhir dari hubungan pernikahan antara suami dan istri yang diputuskan oleh pengadilan karena adanya alasan yang membuat keduanya tidak bisa hidup harmonis sebagai pasangan suami istri. Perceraian bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselingkuhan, perpisahan selama 2 tahun, pelanggaran terhadap janji talak, perubahan agama, atau ketidaksepakatan yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama bisa terjadi karena talak atau gugatan perceraian setelah memenuhi syarat- syarat yang diatur oleh hukum, apabila usaha untuk mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil.

Dalam Islam, perceraian tidak dilarang, namun Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Perceraian merupakan jalan terakhir ketika timbul masalah dan setelah segala cara dilakukann demi rumah tangga, namun tidak ada perubahan. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan dengan perkataan yang jelas. Perceraian itu boleh dilakukan dua kali, setelah itu baru bisa rujuk kembali dengan cara yang baik pula. Dalam Allah SWT berfirman “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Qs Al-

Baqarah 227)

B. Harta Gono Gini

Harta “gono-gini” telah menjadi istilah umum digunakan hukum untuk mengatur ketentuan dalam bermasyarakat. Menurut KBBI, “gana-gini” berarti “Harta yang terkumpul bersama selama berumah tangga, sehingga menjadi hak pasamgan ”. Pada saat terjadi perceraian, pembagian harta gono-gini menjadi penting. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu bersama SM Zain, mendefinisikan bahwa harta gono-gini adalah “Harta perolehan bersama selama bersuami istri”.

Harta gono-gini menurut Islam merujuk pada harta bersama yang dimiliki oleh Pasangan Suami Isteri setelah pernikahan, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan. Harta Gono-gini dibagi berdasarkan prinsip musyawarah dan wajib dilakukan secara adil, dan jika tidak tercapai, dapat melalui pengadilan agama dengan pembagian yang sama antara Pasangan Suami Isteri yang sudah berpisah. Harta gono-gini juga dikenal dalam hukum perdata dan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, istilah “harta gono-gini” memiliki variasi nama di berbagai daerah, seperti di Aceh disebut dengan “Hareuta Sihareukat”, “harta su kang” di

Minangkabau, “guna-kaya” di Sunda, “druwe gobro” di Bali, dan “barang tabu” di Kalimantan. Meski demikian, “harta gono-gini” sekarang lebih populer dan dikenal masyarakat.

C. Hukum Menjatuhkan Perceraian

Para ulama memberikan pendapat yang berbeda mengenai hal ini. Menurut Ibnu Hammam yang didukung oleh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, hukum perceraian yang asli adalah haram (haram) kecuali memiliki keperluan mendesak. Dikutip hadits “al-Halaal ilallah altalaaq” yang artinya perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wa Ta’alla. Oleh karena itu, hukum perceraian yang asli adalah haram. Namun mayoritas ulama menganggap hukum perceraian yang asli itu boleh (ibahah) atau wajib, namun lebih baik jika tidak mengamalkannya. Sebab, perceraian bisa memutuskan ikatan cinta. Hukum

perceraian erat kaitannya dengan kondisi dan situasi tertentu (Asmuni, 2016:1840).

Dalam praktiknya, Hukum Perceraian itu adalah Fleksibel. Menurut Ardiansyah (2019:15), hukum perceraian dapat berubah tergantung situasi, terbagi dalam lima kategori: wajib, dianjurkan, tidak dianjurkan, boleh, dan dilarang dengan keterangan sebagai berikut:

1. Wajib apabila suami tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dalam rumah tangga.
2. Sunnah apabila suami menceraikan isterinya karena sifat isterinya yang buruk, seperti Membiarkan laki laki lain menyentuhnya, atau tidak menunaikan kewajiban agama, seperti menunaikan shalat wajib atau puasa di bulan Ramadhan.

3. Haram

apabila suami menceraikan isterinya tanpa alasan yang sah.

4. Boleh bila ada keperluan, misalnya suami sudah tidak lagi mencintai istrinya.

5. Haram

apabila talak diberikan pada saat isteri sedang haid dan mereka telah melakukan hubungan suami istri sebelumnya, atau pada masa haram namun mereka melakukan hubungan badan pada waktu tersebut.

D. Perceraian menurut hukum fikih

Perceraian dalam fikih adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bukan disebabkan oleh kematian atau takdir, melainkan atas dasar kehendak dan keinginan pasangan dengan adanya suatu alasan

Perceraian terjadi apabila talak sudah dilakukan. Dalam fikih, talak atau cerai dianggap sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak berhasil, menunjukkan pentingnya prosedur hukum dalam penyelesaian perceraian menurut ajaran Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian menurut fikih adalah sebagai berikut:

1. Wali

Seorang wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Perkawinan yang tidak melibatkan wali tidak dianggap sah.

2. Saksi

Proses akad nikah harus disaksikan oleh pihak-pihak yang hadir sebagai saksi.

3. Syarat-syarat Kedua Mempelai

Calon suami harus memenuhi persyaratan seperti beragama Islam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri, jelas bahwa calon suami adalah laki-laki, identitas calon suami dan istri harus jelas dan tertentu, serta calon suami harus mengetahui dengan pasti bahwa calon istri adalah halal baginya

4. Ijab Qabul

Proses ijab qabul harus dilakukan dengan menggunakan sighat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semua syarat ini harus dipenuhi untuk menjatuhkan talak secara sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Dikatakan apabila suami ingin menceraikan isterinya tidak dapat melakukan hal itu dengan leluasa sebagaimana dalam fikih klasik. Ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal istrinya, disertai alasannya. Setelah Pengadilan Agama menerima permohonan tersebut, akan digelar sidang pemanggilan pasangan yang sudah bercerai. Pengadilan akan mendengarkan penjelasan mereka, dan akan menyampaikan argumennya. Pengadilan tidak akan langsung memberikan izin atas perceraian tersebut, namun akan berusaha mendamaikan keduanya terlebih dahulu. Apabila dari pengadilan pun tidak mampu mendamaikan, maka suami diberikan izin ikrar talak di depan pengadilan yang dihadiri istri atau kuasa hukumnya. Apabila tidak ada ikrar cerai dalam kurun waktu 6 bulan, maka mereka tetap dianggap sah

sebagai suami istri.

E. Harta Gono-Gini Dalam Hukum Fikih

Berdasarkan Hukum Al-Fiqh, harta gono-gini merujuk pada harta bersama yang diperoleh atau dihasilkan Pasangan suami istri selama masa pernikahan.

Prinsip ini mencakup pembagian harta berdasarkan keadilan dan kesepakatan. Regulasi pembagian harta gono gini diatur dalam hukum perdata Islam Indonesia, yang berasal dari interpretasi para ulama dan tokoh masyarakat. Meskipun konsep harta gono gini tidak secara tradisional diatur dalam hukum Islam, dalam era kontemporer, hukum positif dan hukum Islam mengakui serta mengatur pembagian harta ini, berikut beberapa penjelasannya:

1. Harta Bersama dalam Syariah Islam

- Dalam syariah Islam, istilah “harta bersama” itu tidak didefinisikan secara faktual, secara otomatis. Harta bisa dimiliki bersama berdasarkan syarat dan kesepakatan untuk memilikinya secara bersama.
- Harta hasil keringat suami Kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh suami. Begitu pula harta hasil keringat isteri, hartanya menjadi kepemilikan penuh sang isteri
- Penghasilan suami pada hakikatnya mutlak milik suami . Namun, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya.
- Jika suami memberikan sebagian hak kepemilikannya kepada istri, maka berubah menjadi harta bersama, terutama jika harta tersebut berupa aset seperti rumah, kendaraan, atau tanah.

2. Undang-Undang Perkawinan Indonesia • UU no. 1 Tahun 1974

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

- Pasal-pasal dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang harta bersama, termasuk pembagian harta setelah perceraian. Contohnya, jika salah satu pasangan meninggal dunia, separuh harta bersama menjadi hak yang masih hidup.

3. Pembagian Harta Gono-Gini

Setelah Pasangan suami istri bercerai, maka harta harus terbagi 50% untuk Suami dan 50% untuk Isteri. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tercapai melalui ketentuan dari pasangan Suami Isteri. Mereka diperbolehkan melakukan perjanjian pembagian harta gono-gini untuk keadilan bersama.

4. Proses Hukum

- Jika terjadi perselisihan terkait harta gono-gini, pengadilan agama akan memanggil penggugat dan tergugat.
- Sidang gugatan akan melibatkan beberapa tahap, termasuk pemeriksaan identitas, pembacaan surat kuasa, mediasi, pemeriksaan saksi, dan penetapan hari putusan oleh hakim.

KESIMPULAN

Perceraian adalah akhir dari hubungan pernikahan pasangan Suami Isteri yang diputuskan oleh pengadilan karena adanya alasan yang membuat keduanya tidak bisa hidup harmonis sebagai pasangan suami istri. Perceraian terjadi karena talak atau gugatan perceraian setelah memenuhi syarat-syarat oleh hukum, apabila usaha untuk mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil. Dalam Islam, perceraian tidak dilarang, namun Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Harta gono-gini telah menjadi istilah hukum yang umum digunakan dalam masyarakat.

Harta gono-gini dalam Islam Merujuk pada harta bersama yang dimiliki oleh pasangann Suami Isteri setelah pernikahan, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan. Harta gono-gini juga memiliki variasi nama di berbagai daerah, digunakan

dalam akademis, yuridis, dan percakapan sehari-hari. Hukum perceraian yang asli adalah haram (haram) kecuali ada keperluan yang mendesak. Perceraian yang asli adalah haram, namun lebih baik jika tidak mengamalkannya. Perceraian memiliki hukum yang fleksibel, tergantung situasi, diuraikan dalam lima kategori: wajib, dianjurkan, tidak dianjurkan, boleh, dan dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Masodi, Haza, Bakri, S. (2022). Perceraian dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1*.
- Dahwadin, dkk. (2021). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 11 Nomor 1*.
- Mutmainna, Kairuddin K., Muhammad A.F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir Volume 9 Nomor 1*.
- Safitri A.I., Zulis M., Muhammad A. (2022). Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang Volume 11 Nomor 1*.
- Harimurti D.A. (2021). Perbandingan Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
- Muttaqin Z. & Siti U.U. (2020). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram. *CIVICUS Volume 8 Nomor 1*.
- Fathony M.R. & Ellemia L.P. (2023). Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Volume 7 Nomor 1*.